KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KM.6/WKN.17/KNL.02/2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

PADA [KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMOHON]

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;

b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada [Kementerian Pemohon];

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016;

7. Keputusan….

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 666/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Memperhatikan : [Surat Permohonan] Nomor [Nomor Surat Permohonan] tanggal [Tanggal Surat Permohonan] hal [Hal Surat Permohonan];

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA [KEMENTERIAN PEMOHON].

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara [Jenis BMN] berupa [Jumlah BMN Nilai Angka] [(Jumlah Nilai Huruf)] [Jenis BMN] sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan.

KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp[Nilai Angka] [(Nilai Huruf rupiah)].

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT : [Kementerian Pemohon] dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh [Kementerian Pemohon] menjadi tanggung jawab [Kementerian Pemohon].

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. [Menteri Pemohon] Republik Indonesia;

2. Sekretaris Jenderal [Kementerian Pemohon];

3. Inspektur Jenderal [Kementerian Pemohon];

4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;

5. Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku;

6. [Kepala Satker BMN Pemohon];

7. Kepala [KPKNL Setempat Pemohon].

Ditetapkan di Jayapura

pada tanggal [Tanggal ditetapkan]

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KPNL JAYAPURA,

BIMO ARYO